

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Ayu Agustina (2021). “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe deskriptif. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Subjek penelitian adalah Koordinator Program STBM, Bidan Pekon Wonodadi, dan masyarakat yang berpartisipasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi sudah baik karena sudah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program dari awal sampai selesai.
2. Ria Anggraini (2022). “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 (Studi Kasus Penuntasan Pilar 1 Di Kelurahan Telaga Bertong)”. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program STMB Pilar 1 dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Di Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Pilar 1 Di Kabupaten Sumbawa Barat masih rendah. Dari rendahnya partisipasi dalam pembangunan jamban disebabkan anggaran pembangunan menggunakan jasa tukang untuk mempercepat pembangunan, hal tersebut bertentangan dengan konsep IJS (Ikhlash, Jujur, Sungguh-sungguh) yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Pemerintah sudah memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemantauan Program STMB, tetapi masyarakat tidak memanfaatkan dengan baik, masyarakat hanya menerima arahan dan perintah tanpa memberikan kritik dan saran. Faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas agen peliuk yang rendah, tidak adanya sosialisasi program STMB kepada masyarakat, dan tidak adanya *Structure Operational Procedure* (SOP) dari tahun 2016 sampai 2020.

B. Tinjauan Teoritis

1. Partisipasi masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi adalah keikutsertaan atau peran dalam menanggulangi suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkut keberhasilan dan kebutuhan orang banyak.

Menurut Mubiyarto dalam (Abidin, 2023:20) mendefinisikan ‘Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri’.

Menurut Theodorson dalam (Theresia dkk, 2015: 196) mengatakan bahwa ‘Partisipasi merupakan keikutsertakan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya diluar pekerjaan ataupun profesinya sendiri’.

Menurut Wazir dalam (Hajar dkk, 2018:30) mengemukakan bahwa ‘Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi social dalam situasi tertentu’.

Menurut Isbandi dalam (Hajar dkk, 2018:30) ‘Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi’.

Menurut Verhagen dalam (Theresia dkk, 2015: 197) mengatakan bahwa ‘Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat’. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- 1) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
- 2) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri.

- 3) Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatannya yang dapat dilakukan.
- 4) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Telaahan tentang pengertian “Partisipasi” yang di kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrensisik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dicapai.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya. Partisipasi masyarakat terhadap Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di artikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan, yang dalam hal ini berkaitan

dengan peran dan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan di sungai.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Dusseldorp dalam (Theresia dkk, 2015:200) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

c. Tipologi Partisipasi

Berdasarkan pemikiran-pemikiran Hobley dalam (Theresia dkk, 2015:204-206) mendefinisikan tujuh tipe partisipasi, antara lain:

- 1) Partisipasi Pasif/Manupulatif adalah masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, informasi yang ditukarkan terbatas pada kalangan professional diluar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi Informasi adalah masyarakat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak di beri

kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian, akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

- 3) Partisipasi Konsultatif adalah masyarakat yang berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya, tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama, para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan, masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti.
- 4) Partisipasi Insentif adalah masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan, masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
- 5) Partisipasi Fungsional adalah masyarakat yang membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembuatan proyek (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- 6) Partisipasi Interaktif adalah masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, cenderung melibatkan metode interdesipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis, masyarakat memiliki peran untuk

mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

- 7) *Self Mobilization* (mandiri) adalah masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki, masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan, masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

d. Tingkatan Partisipasi

Menurut Wilcox dalam (Theresia, 2015:202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan dalam partisipasi yaitu:

- 1) Memberikan Informasi (*information*)
- 2) Konsultasi (*Consultation*): menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

5) Memberi dukungan (*Supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

e. Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet dalam (Theresia dkk, 2015:207-211) mengatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1) Kesempatan untuk Berpartisipasi

Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah:

- a) Kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan.
- b) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
- c) Kesempatan untuk memanfaatkan dan memobilitas sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
- d) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya.
- e) Berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.

f) Menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

2) Kemampuan untuk berpartisipasi

Yang dimaksud dalam kesempatan disini adalah:

a) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).

b) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

c) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

3) Kemauan untuk Berpartisipasi

Tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dapat diupayakan melalui:

a) Pemberi kesempatan yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisioanal kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidupnya dan bukannya pemberian kesempatan yang dilandasi oleh prasangka buruk agar mereka tidak melakukan pengrusakan.

- b) Pemberdayaan yang intensif dan berkelanjutan yang tidak saja berupa penyampaian informasi tentang adanya kesempatan, dorongan dan harapan-harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi.
 - c) Berkaitan dengan dorongan dan harapan yang disampaikan, perlu adanya penjelasan kepada masyarakat tentang besarnya manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung dinikmati sendiri maupun yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Di pihak lain, perlu ada perubahan pemahaman bahwa pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian bukanlah “biaya sosial” (*social cost*) yang merupakan pemborosan, tetapi merupakan “Investasi sosial” (*social investment*) yang akan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- f. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Angell dalam (Hadiyanti, 2023:11) menjelaskan bahwa Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak Faktor. Faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, sebagai berikut:

1) Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3) Pendidikan

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4) Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang

untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

5) Durasi tinggal di sebuah tempat

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2. Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

a. Pengertian Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah suatu Tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) adalah termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat.

b. Pengaruh Tinja Bagi Kesehatan Manusia

Tinja manusia ialah buangan padat dan kotor dan bau juga menjadi media penularan penyakit bagi masyarakat. Kotoran manusia mengandung *organisme pathogen* yang dibawa air, makanan, lalat menjadi penyakit seperti salmonella, diare, dan disentri.

c. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Menurut Hayden dalam (Mahyuni, 2021:34) ‘Karakteristik manusia dan seismografi dalam teori *Health Belief Model* (HBM) meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Dalam teori PRECED/PROCEED faktor seismografi masuk dalam faktor predisposisi’.

Menurut Green dalam (Mahyuni, 2021:35) ‘Perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan dimana kesehatan itu dipengaruhi dua faktor pokok yaitu faktor perilaku dan faktor diluar perilaku’.

Faktor perilaku terdiri dari 3 faktor yaitu faktor predisposisi, faktor penguat dan faktor pemungkin.

1) Faktor yang mempermudah (*Predisposing factors*)

Merupakan faktor yang berasal dari dalam individu yang mendorong terjadinya suatu perilaku yang terwujud dalam umur, pengetahuan, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, jumlah keluarga, nilai, dan persepsi.

a) Umur

Menurut Hurlock dalam (Mahyuni, 2021:35), sebagai ‘Warganegara yang baik usia (30-60 tahun) bertanggung jawab secara sosial membantu anak remaja dan dewasa, sehingga individu-individu tersebut mengetahui cara mewujudkan perilaku sehat.

b) Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo dalam (Mahyuni, 2021:36), 'Pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin luas pula wawasannya'.

c) Sikap

Menurut Green dalam (Mahyuni, 2021:36) 'Sikap merupakan faktor predisposisi yang akan membentuk suatu tindakan atau perilaku. Ketidaksesuaian perilaku seseorang dengan sikapnya akan menimbulkan masalah psikologis bagi individu-individu yang bersangkutan, sehingga mereka akan berusaha merubah sikap dan perilakunya'.

d) Pendidikan

Pendidikan seseorang termasuk faktor predisposisi terhadap perilaku kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan jamban keluarga. Meskipun pada beberapa penelitian tidak menunjukkan adanya hubungan dengan perilaku namun pendidikan mempermudah untuk terjadinya perubahan perilaku, semakin tinggi pendidikan semakin mudah seseorang untuk menerima informasi-informasi baru yang sifatnya membangun (Mahyuni, 2021:37).

d. Faktor pemungkin (*Enabling factors*)

Faktor pemungkin yaitu faktor-faktor yang memudahkan individu atau populasi untuk merubah perilaku dan lingkungan mereka tinggal. Faktor pemungkin terdiri dari ketersediaan air bersih, kepemilikan jamban, dan jarak jamban ke sumber air (Mahyuni, 2021:37-38).

1) Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan sarana air bersih di rumah tangga merupakan faktor pemungkin untuk berperilaku sehat, karena dengan tersedianya sarana air bersih akan lebih memudahkan anggota keluarga untuk menjaga kebersihan diri setelah buang air besar dan jamban yang digunakan.

2) Kepemilikan Jamban

Ketersediaan sarana jamban keluarga merupakan salah satu faktor utama pembentukan perilaku hidup sehat.

e. Faktor Penguat (*Reinforcing factors*)

Faktor yang ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya suatu perilaku yang terwujud dalam kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Faktor penguat ini terdiri dari peran tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama (Mahyuni, 2021:39).

1) Peran tenaga Kesehatan

Salah satu kegiatan pokok puskesmas adalah kesehatan lingkungan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dimana pelaksanaan kegiatan pokok tersebut diarahkan kepada keluarga

sebagai satuan kecil. Terdapat hubungan bermakna antara pembinaan penggunaan jamban oleh petugas puskesmas dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban. Dukungan Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Dalam pembangunan kesehatan di wilayah pedesaan. Adanya dukungan dari aparat desa (kepala desa dan perangkat desa) dianggap penting oleh masyarakat, sehingga segala ucapannya akan mendapat perhatian dan diikuti oleh warganya. Selain aparat desa, kader posyandu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang kesehatan dapat pula memberikan dukungan terhadap warga desa dalam pembangunan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara dukungan aparat desa, kader posyandu dan LSM dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban.

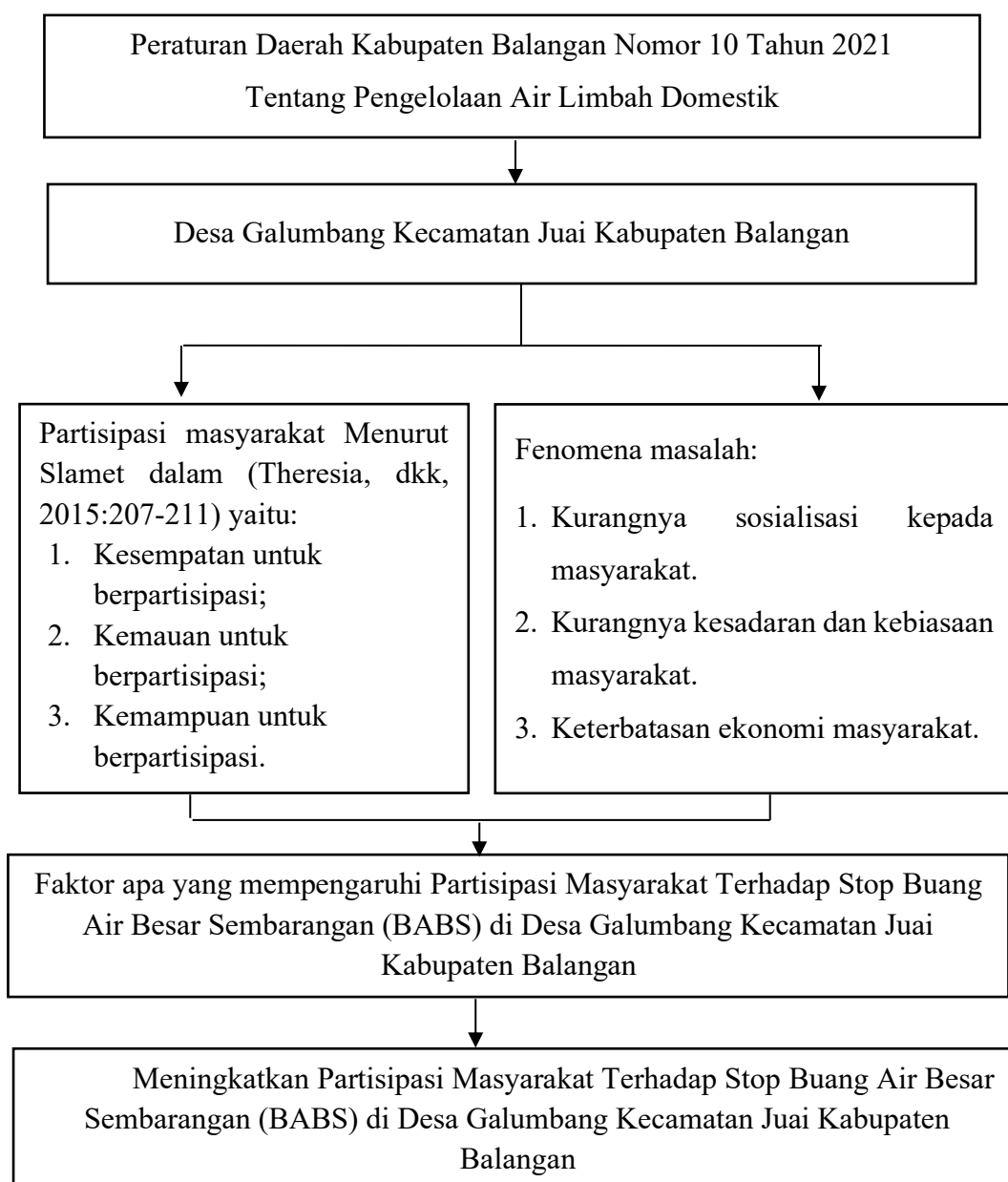
C. Kerangka Pemikiran

Menurut Hardani, dkk (2020:321) “Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya”.

Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis mengkaitkan penelitian dengan teori partisipasi masyarakat menurut Slamet dalam (Theresia, dkk, 2015:207-211) diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi;
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Dibuat Oleh Penulis Tahun 2025